

## BAB II

### MANAJEMEN LABA, *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING* *STANDARD (IFRS)*, KONVERGENSI IFRS, DAMPAK IMPLEMENTASI IFRS, PENELITIAN TERDAHULU, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Manajemen Laba

##### 2.1.1. Pengertian Manajemen Laba

Manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimalkan, atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajemen. Scott (2003: 369) mendefinisikan manajemen laba sebagai pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk mencapai sasaran secara objektif. Scott (2003: 369) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua, yaitu sebagai perilaku oportunistik manajer dan sebagai *efficient contracting (efficient earnings management)*. Manajemen laba sebagai perilaku oportunistik manajer dilakukan untuk memaksimalkan utilitas perusahaan dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan *political cost (opportunistic earnings management)*. Manajemen laba dari perspektif *efficient contracting (efficient earnings management)* dapat dipahami sebagai cara untuk memberi manajer suatu fleksibilitas guna melindungi diri dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga.

Manajemen laba dapat dipahami sebagai perilaku mengubah, menyembunyikan, atau menunda informasi keuangan. Sulistyanto (2008: 4) mengatakan bahwa manajemen laba merupakan perilaku oportunistis manajer untuk memperlakukan angka-angka dalam laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, manajemen laba dapat dipahami sebagai suatu perilaku curang dari manajer perusahaan. Kecurangan dalam manajemen laba disebabkan oleh manipulasi terhadap angka-angka dalam laporan keuangan yang dilakukan secara sadar agar *stakeholder* yang ingin mengetahui kondisi perusahaan tertipu karena memperoleh informasi palsu.

Ronen dan Yaari (2008: 26) mendefinisikan manajemen laba sebagaimana kutipan berikut.

*“Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in structuring transaction to alter financial reports to either mislead some stakeholder about the underlying economic performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers.”*

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan kebijakannya dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan. Hal ini dilakukan manajer dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang berbeda kepada *stakeholder* mengenai kinerja ekonomi perusahaan sehingga mempengaruhi hasil kontrak antara *stakeholder* dengan perusahaan. Manajemen laba pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Memperbaiki citra perusahaan dimata pihak luar, bahwa perusahaan tersebut memiliki risiko yang rendah.
2. Memberikan informasi yang relevan dalam melakukan prediksi terhadap laba di masa yang akan datang.
3. Meningkatkan kepuasan relasi bisnis.
4. Meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemampuan manajemen.
5. Meningkatkan kompensasi bagi pihak manajemen

Widyaningdiah (2004: 92) memberikan pendapat mengenai dampak manajemen laba terhadap kredibilitas laporan keuangan. Manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan apabila digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena manajemen laba merupakan suatu bentuk kecurangan atas laporan keuangan yang menjadi sarana informasi atau komunikasi antara manajer dan pihak eksternal perusahaan.

Para ahli di atas mengemukakan definisi yang berbeda-beda mengenai manajemen laba, namun pada intinya menunjukkan maksud yang sama. Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat dipahami bahwa manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan manajer, untuk memanipulasi laporan keuangan dengan sengaja dalam batasan yang dibolehkan oleh prinsip-prinsip akuntansi. Manajemen laba dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi yang berbeda kepada para pengguna laporan keuangan demi kepentingan tertentu.

### 2.1.2. Bentuk-bentuk Manajemen Laba

Manajemen laba menjadi suatu hal yang tidak baik dilakukan karena informasi dalam laporan keuangan yang disajikan berkurang reliabilitasnya, sehingga dapat berakibat pada pembuatan keputusan yang kurang *valid*. Manajemen laba memiliki tiga bentuk utama, yaitu upaya perataan laba (*income smoothing*) untuk setiap periode, upaya peningkatan atau pemaksimalan, dan penurunan atau meminimalan laba dalam suatu periode. Bentuk-bentuk manajemen laba menurut Scott (2003: 370) adalah *taking a bath*, *income minimization*, *income maximization*, dan *income smoothing*. Berikut ini merupakan penjabaran mengenai bentuk-bentuk manajemen laba tersebut:

#### 1. *Taking a Bath*

*Taking a bath* terjadi pada periode reorganisasi termasuk pengangkatan *Chief Executive Officer* (CEO) baru. *Taking a bath* adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim rendah (bahkan rugi) atau sangat ekstrim tinggi dibandingkan dengan laba pada periode sebelumnya atau sesudahnya. *Taking a bath* mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan datang dan kerugian pada periode berjalan ketika terjadi keadaan buruk yang tidak menguntungkan dan tidak bisa dihindari pada periode berjalan. Manajemen harus menyusutkan beberapa aset dan membebankan perkiraan biaya mendatang, sehingga laba yang dilaporkan di periode mendatang meningkat.

## 2. *Income Minimization*

*Income minimization* adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya. *Income minimization* biasanya dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa depresiasi atas barang modal dan aset tidak berwujud, biaya iklan, dan pengeluaran untuk *Research and Development*.

## 3. *Income Maximization*

*Income maximization* adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. *Income maximization* dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan dan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang. *Income maximization* dilakukan dengan cara mempercepat pencatatan pendapatan, menunda biaya, dan memindahkan biaya untuk periode lain. *Income maximization* dilakukan pada saat laba menurun. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

## 4. *Income Smoothing*

*Income smoothing* atau perataan laba merupakan salah satu bentuk manajemen laba yang dilakukan dengan cara membuat laba akuntansi relatif konsisten dari periode ke periode. Dalam hal ini, pihak manajemen dengan

sengaja menurunkan atau meningkatkan laba untuk mengurangi gejolak dalam pelaporan laba, sehingga perusahaan terlihat stabil atau tidak berisiko tinggi. Perataan laba atau *income smoothing* merupakan usaha yang disengaja untuk meratakan laba sehingga dipandang normal. *Income smoothing* dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

Ayres (dalam Zeff & Dharan, 1994: 540) menguraikan bentuk-bentuk manajemen laba, antara lain manajemen akrual, penerapan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib, dan perubahan akuntansi secara sukarela. Masing-masing bentuk tersebut diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Manajemen Akrual

Manajemen akrual biasanya dikaitkan dengan segala aktivitas yang dapat mempengaruhi aliran kas yang secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer (*manager's discretion*). Contoh manajemen akrual antara lain adalah dengan mempercepat atau menunda pengakuan akan pendapatan (*revenue*), menganggap sebagai biaya atau menganggap sebagai suatu tambahan investasi, dan perkiraan-perkiraan akuntansi lainnya, seperti beban piutang ragu-ragu, dan perubahan-perubahan metode akuntansi.

## 2. Penerapan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib

Sehubungan dengan penerapan suatu kebijakan akuntansi yang wajib dilakukan oleh perusahaan, manajemen perusahaan memiliki dua pilihan, yaitu: apakah menerapkan lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijakan tersebut. Untuk suatu kebijakan akuntansi baru yang wajib, badan akuntansi yang ada akan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk dapat menerapkannya lebih awal dari waktu berlakunya. Para manajer tentu saja akan memilih untuk menerapkan suatu kebijaksanaan akuntansi yang baru bila dengan penerapan tersebut akan dapat mempengaruhi aliran kas perusahaan.

## 3. Perubahan akuntansi secara sukarela

Dalam kaitannya dengan faktor yang ketiga, yaitu perubahan metode akuntansi secara sukarela, hal ini biasanya berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau merubah suatu metode akuntansi tertentu, diantara sekian banyak metode yang dapat dipilih dan tersedia, serta diakui oleh badan akuntansi.

Manajemen laba dapat dipicu oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang menjadi pemicu manajemen laba antara lain dapat bersumber dari kontrak antara manajer dan pemilik perusahaan. Setiawati dan Na'im (dalam Setyaningrum, 2008: 36) mengungkapkan beberapa alasan pemicu manajemen laba sebagaimana berikut.

1. Kontrak antara manajer dan pemilik (melalui kompensasi). Kompensasi yang didasarkan atas data akuntansi merupakan insentif bagi manajer untuk memilih prosedur dan metode akuntansi yang dapat memaksimalkan besarnya bonus yang akan diperoleh.
2. Sumber informasi bagi investor di pasar modal. Suatu perusahaan akan mencoba membuat laporan keuangan secara agresif pada saat pertama kali go publik agar dapat menarik investor.
3. Kontrak hutang. Salah satu persyaratan dalam pemberian kredit seringkali mencakup kesediaan debitur untuk mempertahankan tingkat rasio modal kerja minimal, rasio *debt to equity* minimal, maksimum pemberian deviden ke pemegang saham, atau batasan-batasan lain yang umumnya dikaitkan dengan data akuntansi perusahaan.
4. Penetapan pajak oleh pemerintah, penentuan proteksi terhadap produk, penentuan denda dalam suatu kasus, dan lain sebagainya. Redaksi tingkat pajak tersebut merupakan insentif bagi manajemen untuk melakukan rekayasa laba akuntansi, dan penghematan pajak menjadi insentif bagi manajer khususnya manajer yang mengalami *net operating loss* untuk mempercepat pengakuan biaya dan menunda pengakuan pendapatan.
5. Pesaing, untuk menentukan keputusan ambil alih ataupun untuk penetapan strategi persaingan.
6. Karyawan, untuk meminta kenaikan upah/gaji, dan bonus.

Mulford & Comiskey (2002: 156) mengemukakan penyebab dilakukannya manajemen laba, yaitu manajemen laba dapat membantu untuk merasionalisasikan harapan perusahaan ketika berada dalam periode yang kurang baik karena adanya biaya yang tidak biasa atau hutang dalam pendapatan. Manajemen laba mungkin saja tidak masalah apabila dilakukan pada kuartal dimana perusahaan mengalami penurunan pendapatan akibat adanya penundaan pembayaran dalam penjualan. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa pendapatan perusahaan akan membaik pada periode selanjutnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa terdapat berbagai macam bentuk dan alasan manajer melakukan manajemen laba. Manajemen laba dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap manajer. Manajemen laba berhubungan erat dengan tingkat perolehan laba atau prestasi usaha suatu perusahaan, hal ini karena tingkat keuntungan atau laba dikaitkan dengan prestasi manajer dan juga besar kecilnya bonus yang akan diterima oleh manajer.

### **2.1.3. Pengukuran Manajemen Laba**

Manajemen laba perlu dideteksi untuk mengetahui ada tidaknya manipulasi laba. Pengukuran terhadap akrual merupakan asumsi yang tepat untuk pengukuran manajemen laba. Hal ini disebabkan dasar akrual dalam laporan keuangan memberikan kesempatan kepada manajer untuk memodifikasi informasi di dalam laporan keuangan untuk menghasilkan jumlah laba (*earnings*)

yang diinginkan. Standar Akuntansi Keuangan juga memberikan keleluasaan kepada manajer untuk memilih metode akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Deteksi atas kemungkinan dilakukannya manajemen laba dalam laporan keuangan secara umum diteliti melalui penggunaan akrual. Total akrual adalah selisih antara laba dan arus kas yang berasal dari aset operasi. Jumlah akrual yang tercermin dalam perhitungan laba terdiri dari *discretionary accruals* atau *abnormal accruals* dan *non discretionary accrual* atau *normal accruals*. Macam-macam pengukuran manajemen laba melalui basis akrual menurut Bartov, *et al.* (2000: 8-13) antara lain diuraikan sebagaimana berikut.

#### 1. Model DeAngelo

Model DeAngelo menggunakan periode terakhir total akrual ( $TA_{t-1}$ ) dengan skala total aset periode sebelumnya ( $t-2$ ) sebagai ukuran akrual tindakan rutin. Dengan demikian, model untuk tindakan rutin akrual ( $NDA_t$ ) adalah:

$$NDA_t = TA_{t-1} / A_{t-2}$$

Bagian *discretionary accrual* dalam model ini adalah perbedaan antara total akrual dalam acara tahun  $t$  diskala dengan skala di  $A_{t-1}$  dan  $NDA_t$ .

#### 2. Model Healy

Healy menguji manajemen laba dengan membandingkan rata-rata total akrual (diskala dengan lag *total asset*) antar variabel yang

merupakan bagian manajemen laba. Model Healy yang digunakan sebagai berikut.

$$NDA_t = 1/n \sum_{\tau} (TA_{\tau} / A_{\tau-1})$$

Keterangan:

$NDA_t$  : *nondiscretionary accruals* pada tahun t

n : jumlah tahun dari periode estimasi

TA : total akrual yang diskala dengan lag *total asset*

$\tau$  : merupakan tahun *subscript* untuk tahun yang termasuk dalam periode estimasi

t : tahun *subscript* yang menunjukkan tahun dalam periode kejadian

### 3. Model Jones

Jones mengusulkan suatu model yang memudahkan asumsi yaitu bahwa *discretionary accruals* adalah konstan. Model Jones mencoba untuk mengendalikan pengaruh perubahan dalam keadaan ekonomi perusahaan atas *nondiscretionary accruals* dalam tahun kejadian adalah:

$$NDA_t = \alpha_1(1 / A_{t-1}) + \alpha_2(\Delta REV_t / A_{t-1}) + \alpha_3(PPE_t / A_{t-1})$$

Keterangan:

$NDA_t$  : *nondiscretionary accruals* pada tahun t

$\Delta REV$  : *revenue* ditahun t dikuangi dengan *revenue* t-1 yang diskala oleh *total asset*

$PPE_t$  : properti pabrik dan peralatan kantor ditahun t yang diskala dengan *total asset* pada t-1

$A_{t-1}$  : *total asset* pada tahun t

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  : *total asset* pada tahun t

#### 4. Modified Jones

Model yang telah dimodifikasi ini dirancang untuk mengurangi kecenderungan asumsi dari model Jones untuk mengukur *discretionary accruals* dengan kesalahan saat *discretionary* diterapkan pada *revenue*. Dalam tabel *discretionary Jones*, *discretionary accrual* diestimasi selama periode kejadian menggunakan rumus:

$$NDA_t = \alpha_1(1/A_{t-1}) + \alpha_2[(\Delta REV_t - \Delta REC_t) / A_{t-1}] + \alpha_3(PPE_t / A_{t-1})$$

Keterangan:

$\Delta REC$  : *receivable* bersih dalam tahun t dikurangi piutang bersih ditahun t-1 yang diskala dengan *total asset* pada t-1

#### 5. Model Industri

Model industri juga memiliki asumsi bahwa biaya akrual konstan dari waktu ke waktu. Model industri mengasumsikan bahwa variasi dalam faktor penentu akrual secara rutin pada umumnya sama di seluruh perusahaan dengan industri yang sama. Model industri untuk tindakan rutin akrual adalah sebagai berikut.

$$NDA_t = \beta_1 + \beta_2 \text{median}_j(TA_t / A_{t-1})$$

Keterangan:

$NDA_t$  : *nondiscretionary accruals* pada tahun t

$\text{median}_j(TA_t / A_{t-1})$  : nilai rata-rata total akrual tahun t

#### 6. Model *Cross-Sectional*

Model *Cross Sectional* dimodifikasi dari Model Jones dan Modifikasi Model Jones yang disesuaikan untuk data *cross sectional*. Model *Cross Sectional* sama dengan kedua model tersebut, kecuali parameter model yang diperkirakan dengan menggunakan data yang bukan *time series*. Dengan demikian, estimasi-estimasi parameter  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ , dan  $\alpha_3$  pada Model Jones dan Modifikasi Model Jones diperoleh dengan menggunakan data dari pengelompokan data industri.

#### 7. Model Akrual

Estimasi dari keseluruhan model yang telah dijelaskan sebelumnya melibatkan komputasi total akrual (TA). Model akrual menggunakan pendekatan neraca untuk menghitung TA sebagai berikut.

$$TA_t = \Delta CA_t - \Delta \text{Cash}_t - \Delta \text{CL}_t + \Delta \text{DCL}_t - \text{DEP}_t$$

Keterangan:

$\Delta CA_t$  : perubahan aset lancar dalam tahun t

$\Delta\text{Cash}_t$  : perubahan kas dan setara kas di tahun t

$\Delta\text{CL}_t$  : perubahan kewajiban lancar dalam tahun t

$\Delta\text{DCL}_t$  : perubahan kewajiban lancar dalam tahun t

$\text{DEP}_t$  : depresiasi dan amortisasi biaya dalam tahun t

Hann & Lu (2009: 3) memproksikan manajemen laba tingkat segmen dari besarnya *Discretionary Unallocated Cost* (DUC). Penghitungan *Discretionary Unallocated Cost* (DUC) dalam Model Hann & Lu adalah sebagai berikut.

$$\text{TUC} = \text{NUC} + \text{DUC}$$

Keterangan:

TUC : *Total Unallocated Cost*

NUC : *Nondiscretionary Unallocated Cost*

DUC : *Discretionary Unallocated Cost*

Melalui diskusi dari berbagai model pengukuran manajemen laba, Hann & Lu (2009) menyusun model berikut.

$$\text{TUC} = \alpha + \beta_1 \text{DIVERSE} + \beta_2 \text{CAPINT} + \beta_3 \text{NSEG} + \beta_4 \text{FROA} + \beta_5 \text{FSIZE} + e$$

Keterangan:

TUC : Selisih total laba operasi segmen (kecuali segmen utama) dan laba operasi perusahaan, dibagi dengan total aset.

DIVERSE : Diversifikasi segmen usaha

- CAPINT : *Capital Intensity*
- NSEG : Total jumlah segmen usaha
- FROA : *Firm's Return On Aset*
- FSIZE : Logaritma natural *market value* perusahaan
- e : *Discretionary Unallocated Cost*

Penelitian ini memilih untuk menggunakan model Hann & Lu (2009), dengan alasan karena manajemen laba yang dideteksi dalam penelitian ini adalah manajemen laba di tingkat segmen. Estimasi model manajemen laba sesuai dengan estimasi terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh penelitian Hann & Lu (2009).

## **2.2. International Financial Reporting Standard (IFRS)**

IFRS adalah standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh *International Accounting Standar Board (IASB)*. Empat organisasi utama di dunia yang melakukan penyusunan standar akuntansi internasional adalah *International Accounting Standard Board (IASB)*, *European Community (EC)*, *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*, dan *International Federation of Accountants (IFAC)*. *International Accounting Standar Board (IASB)* merupakan lembaga independen yang didanai oleh pihak swasta dan berperan dalam menyusun standar akuntansi berbasis di London (Norton, *et al.*, 2006: 64). Lebih lanjut, Norton *et al.* (2006: 64) menerangkan bahwa tujuan dari IASB adalah mengembangkan standar akuntansi internasional yang berkualitas tinggi, dapat dipahami, dan dapat

dilaksanakan secara global untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan dapat diperbandingkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa IASB yang melakukan penyusunan terhadap standar akuntansi internasional. Purwanti dan Nugraheni (2007: 8) menyatakan bahwa akuntansi internasional mencakup berbagai transaksi yang terjadi dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang beroperasi pada beberapa negara. Standar akuntansi yang dapat digunakan oleh perusahaan tersebut dalam melakukan penyusunan laporan keuangannya adalah IFRS. IFRS menjadi standar yang dapat digunakan perusahaan multinasional untuk menjembatani perbedaan-perbedaan antar negara dalam perdagangan global.

Lestari (2013: 3) mengungkapkan bahwa sebelumnya IFRS lebih dikenal dengan nama *International Accounting Standards* (IAS). IAS diterbitkan antara tahun 1973 dan 2001 oleh *Board of International Accounting Standards Committee Foundation* (IASC). Pada tahun 2000, anggota badan ini menyetujui restrukturisasi IASC dan Konstitusi baru IASC. Pada bulan Maret 2001, IASC Trustee mengesahkan bagian B Konstitusi baru IASC dan mendirikan sebuah perusahaan nirlaba Delaware bernama *International Accounting Standards Committee Foundations* untuk mengawasi IASB. Pada tanggal 1 April 2001 IASB yang baru dibentuk mengambil alih dari IASC tanggungjawab menetapkan Standar Akuntansi Internasional. Dalam pertemuan pertama, Dewan baru itu mengadopsi IAS dan SICs yang sudah ada. Kemudian IASB terus melanjutkan pengembangan standar akuntansi internasional

dengan menyebut standar baru mereka itu dengan sebutan *International Financial Reporting Standards* (IFRS). IFRS mencakup beberapa standar berikut.

1. *International Financial Reporting Standards* (IFRS), standar yang diterbitkan setelah tahun 2001
2. *Interpretations* yang diterbitkan oleh *International Financial Reporting Interpretations Committee* (IFRIC) setelah tahun 2001
3. *Interpretations* yang diterbitkan oleh *Standing Interpretations Committee* (SIC) – sebelum tahun 2001

IFRS merupakan standar akuntansi yang muncul karena adanya tuntutan globalisasi yang mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk beroperasi lintas negara. Perusahaan-perusahaan multinasional membutuhkan suatu standar akuntansi internasional yang dapat berlaku di seluruh negara. IFRS memberikan penekanan pada penilaian (*revaluation*) profesional dengan *disclosures* yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu.

Situmorang dan Purwanto (2011: 8) menjelaskan manfaat menggunakan suatu standar yang berlaku secara internasional (IFRS) yang bisa dirasakan oleh perusahaan sebagaimana berikut.

1. Penurunan dalam hal biaya
2. Penurunan / pengurangan resiko ketidakpastian dan *misunderstanding*
3. Komunikasi yang lebih efektif dengan investor

4. Perbandingan dengan anak perusahaan dan induk perusahaan di negara yang berbeda dapat dilakukan
5. Perbandingan mengenai *contractual terms* seperti *lending contracts* dan bonus atas kinerja manajemen

Sampai dengan saat ini, terdapat berbagai lembaga yang aktif dalam harmonisasi standar akuntansi. Lembaga-lembaga tersebut antara lain IASC *International Accounting Standard Committee* (IASC), *United Nation* (UN), dan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Harmonisasi IFRS dapat memberikan keuntungan bagi banyak pihak, seperti halnya perusahaan-perusahaan multinasional, kantor akuntan internasional, organisasi perdagangan, serta IOSCO. Dengan adanya keuntungan tersebut, sejumlah perusahaan multinasional secara sukarela telah mengadopsi IFRS sehingga harmonisasi berjalan dengan efektif dan efisien. Dibalik kesuksesan IFRS, banyak pula pro dan kontra yang muncul dalam penerapan standar internasional. Sebagai contoh, komisi pasar modal Amerika Serikat SEC tidak menerima IFRS sebagai dasar pelaporan keuangan yang diserahkan perusahaan-perusahaan yang mencatatkan saham pada bursa efek AS. SEC kemudian berada dalam tekanan yang makin meningkat untuk membuat pasar modal AS lebih dapat diakses oleh para pembuat laporan non-AS. SEC kemudian menyatakan dukungan atas tujuan IASB untuk mengembangkan standar akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan yang digunakan dalam penawaran lintas batas. Pada tahun 2008, SEC merilis suatu jadwal yang akan memberikan mandat kepada perusahaan AS untuk menggunakan IFRS (Needles & Powers, 2013: 2).

### 2.3. Konvergensi IFRS

Sampai dengan saat ini, telah banyak negara mengadopsi dan menggunakan IFRS secara keseluruhan sebagai dasar standar akuntansi nasional. Pilihan ini dilakukan oleh banyak negara guna memenuhi tuntutan investor institusional dan pengguna laporan keuangan lainnya. Di Indonesia sendiri, tentunya ada perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dengan IFRS. Perbedaan utama standar akuntansi internasional ini dengan standar yang berlaku di Indonesia terletak pada penerapan *revaluation model*, yaitu kemungkinan penilaian aset menggunakan nilai wajar, sehingga laporan keuangan disajikan dengan basis *'true and fair (IFRS framework paragraph 46)*.

Menerapkan IFRS berarti menggunakan bahasa pelaporan keuangan global, yang akan membuat perusahaan bisa dimengerti oleh pasar dunia (*global market*). Adopsi IFRS dengan konvergensi IFRS memiliki perbedaan. Adopsi berarti bahwa standar akuntansi nasional secara langsung digantikan dengan IFRS. Adopsi IFRS dilakukan oleh negara-negara anggota *European Union (EU)*. Mirza *et al.* (2011: 3) menjelaskan bahwa secara legislasi, EU telah mengadopsi IFRS sejak tahun 2002. Sejak tahun 2005 IFRS diberlakukan secara penuh oleh lebih dari 8000 perusahaan di 30 negara, termasuk Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Inggris.

Konvergensi merupakan mekanisme bertahap yang dilakukan suatu negara untuk mengganti standar akuntansi nasionalnya dengan IFRS. Konvergensi banyak ditemukan di negara berkembang (Nobes dalam Qomariah, 2013: 16). Walaupun

belum memasuki tahap adopsi penuh, namun konvergensi menunjukkan perbedaan yang minimal antara standar akuntansi yang diberlakukan dengan IFRS.

Di Indonesia, program konvergensi ke IFRS dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). DSAK adalah badan yang berwenang menyusun standard akuntansi keuangan untuk entitas privat di Indonesia. Menurut DSAK (dalam Qomariah, 2013: 16-17), tingkat pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi 5 tingkat sebagaimana berikut.

1. *Full Adoption*, yaitu kondisi ketika suatu negara mengadopsi seluruh standar IFRS dan menerjemahkan IFRS sama persis ke dalam bahasa yang negara tersebut gunakan.
2. *Adopted*, yaitu kondisi ketika program konvergensi PSAK ke IFRS telah dicanangkan IAI pada Desember 2008. *Adopted* maksudnya adalah mengadopsi IFRS namun disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut.
3. *Piecemeal*, yaitu kondisi ketika suatu negara hanya mengadopsi sebagian besar nomor IFRS yaitu nomor standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja.
4. *Referenced (convergence)*, yaitu kondisi ketika standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar.
5. *Not adopted at all* yaitu kondisi ketika suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.

Selama ini, PSAK bersifat *rule-based* atau berdasarkan aturan. Hal ini memungkinkan setiap perusahaan untuk menerapkan prosedur akuntansi secara benar

dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Konvergensi IFRS menyebabkan PSAK menjadi bersifat *principle-based* atau berdasarkan prinsip. Berbeda dengan *rule-based*, *principles based* lebih bersifat subjektif dan dapat memicu timbulnya masalah pada pelaporan keuangan. Kondisi ini tentunya memerlukan *professional judgment*. Dengan demikian, seiring peningkatan kompetensi, peningkatan integritas harus dilaksanakan juga agar tidak terjadi masalah dalam konvergensi IFRS.

Sinaga (2014: 2) menjelaskan beberapa fase dalam tahap konvergensi IFRS di Indonesia. Fase pertama adalah dari tahun 2008 sampai dengan 2012. Komitmen publik mengenai konvergensi IFRS dimulai pada tanggal 8 Desember 2008, yang kemudian berlangsung sampai dengan 1 Januari 2012. Tahap ini meliputi adopsi seluruh IFRS ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku. Fase kedua dimulai sejak tanggal 1 Januari 2012, dan direncanakan berlangsung sampai dengan tahun 2015. Pada tahap ini dilakukan penyelesaian infrastruktur yang diperlukan, serta implementasi IFRS mulai dijalankan. Implementasi IFRS mulai dijalankan sejak tahun 2012, melalui penerapan pertama kali PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS dan evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif.

Berdasarkan hasil proposal konvergensi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), proses konvergensi IFRS diklasifikasikan kedalam tiga tahap, yaitu tahap adopsi, tahap persiapan, dan tahap implementasi. Jadwal pelaksanaan dari setiap tahapan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.

## Tahap Konvergensi IFRS di Indonesia

No	Tahap	Keterangan	Tahun
1.	Tahap Adopsi	Adopsi seluruh IFRS terakhir ke dalam PSAK	2008 – 2010
2.	Tahap Persiapan	Penyiapan seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS	2011
3.	Tahap Implementasi	Penerepan PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik.	2012

Sumber: Proposal Konvergensi IFRS IAI (dalam Marasanti, 2013: 113)

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 3 tahap utama dalam implementasi IFRS, yaitu tahap adopsi, tahap persiapan, dan tahap implementasi. Dari ketiga tahap tersebut, tahap adopsi akan dilakukan dengan cara adopsi satu per satu IFRS. Pada tahun 2009, Indonesia belum mewajibkan perusahaan-perusahaan *listing* di BEI menggunakan sepenuhnya IFRS, melainkan masih mengacu kepada standar akuntansi keuangan nasional atau PSAK. Perusahaan yang memenuhi syarat kemudian sangat dianjurkan untuk mengadopsi IFRS pada tahun 2010. Pada tahun 2012, Dewan Pengurus Nasional IAI bersama-sama dengan Dewan Konsultatif SAK dan DSAK merencanakan untuk menyusun/merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IFRS versi 1 Januari 2009.

#### 2.4. Dampak Implementasi IFRS

Pada berbagai negara di dunia, implementasi IFRS telah menuai banyak pro dan kontra. Beberapa penelitian terdahulu telah mengungkapkan dampak dari

konvergensi IFRS. Daske *et al.* (2008) melakukan penelitian tentang konsekuensi ekonomis dari adopsi IFRS secara wajib di seluruh dunia. Daske mengamati dampak adopsi IFRS terhadap likuiditas pasar, *cost of capital* dan Tobins Q dengan sampel perusahaan besar di 26 negara di dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi IFRS berdampak terhadap likuiditas pasar. Secara rata-rata likuiditas pasar meningkat pada peristiwa sekitar adopsi IFRS, selain itu *cost of capital* perusahaan menjadi lebih rendah.

Pasar memiliki reaksi tersendiri terhadap adopsi IFRS. Armstrong *et al.* (2010) melakukan penelitian tentang reaksi pasar Uni Eropa terhadap adopsi IFRS. Adopsi IFRS yang dilakukan termasuk IAS 39 yang mengatur tentang penilaian *financial instrument* dengan *fair value*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pasar merespon positif atas peristiwa adopsi IFRS di Uni Eropa, sebab pasar menilai dengan diadopsinya IFRS dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi, dan menurunkan asimetri informasi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh fakta empiris bahwa adopsi IFRS berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi, dan menurunkan asimetri informasi.

Qomariah (2013: 21) mengatakan bahwa konvergensi PSAK ke IFRS memiliki beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
2. Mengurangi biaya SAK
3. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan
4. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan

5. Meningkatkan transparansi keuangan
6. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal
7. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan

Perubahan konseptual yang dialami oleh dunia akuntansi di Indonesia, akan menimbulkan dampak yang bermacam-macam bagi perkembangan ilmu akuntansi. Berbagai manfaat di atas menunjukkan bahwa adopsi IFRS akan memberikan dampak positif terhadap penyusunan laporan keuangan. Salah satu IFRS yang diadopsi ke dalam PSAK adalah IFRS 8: *Operating Segments* menjadi PSAK Nomor 5 (Revisi 2009): Segmen Operasi. PSAK 5 (revisi 2009): Segmen Operasi merevisi PSAK 5 (revisi 2000): Pelaporan Segmen.

PSAK 5 (revisi 2009) mempunyai beberapa pengaturan yang berbeda dengan PSAK 5 (revisi 2000). Dalam ketentuan transisi PSAK 5 (revisi 2009) disyaratkan untuk disajikan kembali (*restatement*) informasi segmen untuk tahun-tahun lalu yang dilaporkan sebagai informasi komparatif untuk awal tahun penerapan sesuai dengan persyaratan dalam PSAK 5 (revisi 2009). Pengaturan ketentuan transisi dalam PSAK 5 (revisi 2009) tersebut sejalan dengan pengaturan dalam IFRS 8: *Operating Segments*. Hal ini menjadi pertimbangan untuk ketentuan transisi dalam PSAK 5 (revisi 2009). PSAK 5 (Revisi 2009): Segmen Operasi mengadopsi seluruh pengaturan dalam IFRS 8 (2009): *Operating Segment*.

Berikut ini adalah tabel perbedaan PSAK 5 (2000) menjadi PSAK 5 (2009) yang telah mengadopsi IFRS 8.

Tabel 2.2.

## Perbedaan PSAK 5 (2000) dan PSAK 5 (2009)

<b>Perihal</b>	<b>PSAK 5 (revisi 2009)</b>	<b>PSAK 5 (revisi 2000)</b>
Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan keuangan tersendiri</li> <li>• Laporan keuangan konsolidasian (Paragraf 02)</li> </ul>	Laporan keuangan yang lengkap (Paragraf 02)
Definisi	Hanya ada definisi “segmen operasi”. (Paragraf 05)	Ada definisi istilah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• segmen usaha, segmen geografis, dan segmen dilaporkan (Paragraf 09)</li> <li>• pendapatan, beban, hasil, aset, kewajiban, kebijakan akuntansi segmen, dan organ perusahaan berwenang (Paragraf 08 dan 16)</li> </ul>
Segmen Usaha	Suatu komponen entitas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• terlibat dalam aktivitas usaha dan memperoleh pendapatan dan terjadi beban.</li> <li>• hasilnya di kaji ulang secara reguler oleh organ pengambil keputusan tentang sumber daya dan kinerja.</li> <li>• tersedia informasi keuangan terpisah. (Paragraf 05)</li> </ul>	Suatu komponen entitas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa</li> <li>• risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lain (Paragraf 09)</li> </ul>

Tabel 2.2. (Lanjutan)

## Perbedaan PSAK 5 (2000) dan PSAK 5 (2009)

Perihal	PSAK 5 (revisi 2009)	PSAK 5 (revisi 2000)
Identifikasi segmen dilaporkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Syarat kualitatif (pengertian segmen usaha)</li> <li>• Syarat kuantitatif: Menghilangkan syarat Mayoritas (&gt;50% penjualan eksternal) (Paragraf 13)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat syarat kualitatif</li> <li>• Syarat kuantitatif: Mayoritas (&gt;50% penjualan eksternal). (Paragraf 33)</li> <li>• Suatu segmen dapat dianggap segmen dilaporkan (tanpa melihat ukuran kuantitatif) (Paragraf 36)</li> <li>• Integrasi vertikal, segmen penjual di gabung ke segmen pembeli (jika bukan segmen terpisah) (Paragraf 39)</li> </ul>
Kebijakan akuntansi Segmen	Tidak dijelaskan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi segmen disusun sesuai kebijakan akuntansi segmen</li> <li>• Aset yang digunakan bersama dialokasikan ke setiap segmen jika pendapatan dan bebannya dialokasikan (Paragraf 42)</li> </ul>

Tabel 2.2. (Lanjutan)

Perbedaan PSAK 5 (2000) dan PSAK 5 (2009)

<b>Perihal</b>	<b>PSAK 5 (revisi 2009)</b>	<b>PSAK 5 (revisi 2000)</b>
Pengungkapan segmen dilaporkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umum</li> <li>• Laba atau rugi segmen, aset dan kewajiban segmen</li> <li>• Rekonsiliasi total pendapatan, laba atau rugi, aset, kewajiban, dan unsur material lain antara segmen dengan entitas (Paragraf 21)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk primer pelaporan</li> <li>• Bentuk sekunder pelaporan (Paragraf 47)</li> </ul>
Pengungkapan pada level entitas	<p>Jika belum ada dalam pelaporan segmen, maka diungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk dan jasa (Paragraf 32)</li> <li>• Area geografis (Paragraf 33)</li> </ul>	Tidak diatur

Sumber : PSAK 5 (2000) dan PSAK 5 (2009)

Pengungkapan informasi-informasi segmen pada laporan keuangan segmen sebelum mengadopsi IFRS 8 hanya terbatas pada informasi tertentu saja. Beban-beban segmen seperti beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban-beban lain-lain, beban bunga dan keuangan, dan lain-lain diungkapkan secara lebih terperinci pada laporan informasi segmen yang telah menggunakan PSAK 5 (2009). Pelaporan segmen yang diatur dalam PSAK 5 (2009) setelah adopsi IFRS 8 memiliki komponen pelaporan yang lebih rinci, sehingga diharapkan mampu meningkatkan transparansi dari informasi segmen yang disajikan dalam laporan keuangan.

## 2.5. Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang serupa bertujuan untuk mengetahui gambaran penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya, suatu penelitian tidak beranjak dari awal, akan tetapi telah ada acuan yang mendasarinya. Acuan ini digunakan sebagai titik tolak untuk mengadakan suatu penelitian. Tinjauan penelitian terdahulu dapat bersumber dari jurnal dan laporan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Beberapa penelitian dengan topik yang relevan dengan penelitian ini diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3.

Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Hann & Lu (2009)	<i>Earnings Management at the Segment Level</i>	Manajemen laba di tingkat segmen, sebelum dan sesudah adopsi SFAS 131.	Terdapat perbedaan tingkat manajemen laba segmen sesudah penerapan SFAS 131. Manajemen laba semakin berkurang.
Narendra (2013)	Pengaruh Pengadopsian Internasional Financial Reporting Standar (IFRS) Terhadap Manajemen Laba	H1: Var. Dependen = Manajemen Laba, Var. Independennya = Adopsi IFRS, Var. kontrol = <i>Size, Leverage, Book to Market Ratio</i> , Porsi kepemilikan perusahaan. H2: Uji beda, 1 variabel, yaitu manajemen laba di tingkat segmen	Hasil menunjukkan bahwa di antara keempat variabel kontrol, <i>financial leverage</i> menunjukkan pengaruh positif terhadap manajemen laba. <i>Market to book value</i> menunjukkan pengaruh negatif, sedangkan <i>size</i> dan <i>institutional investors</i> ditemukan tidak berpengaruh. Maka, disimpulkan bahwa dengan adopsi IFRS belum menjamin adanya penurunan manajemen laba.

Tabel 2.3. (Lanjutan)

## Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Qomariah (2013)	Dampak Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba Dengan Struktur Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderating	H1: Var. Dependen = manajemen laba, Var. Independen = IFRS, dan Struktur Kepemilikan Manajerial H2: Var. Dependen = Manajemen laba, Var. Independen = IFRS, Var. Moderating = Struktur kepemilikan manajerial	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konvergensi IFRS mempunyai pengaruh negatif terhadap tindakan manajemen laba, struktur kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan perataan laba, dan struktur kepemilikan manajerial pada saat konvergensi IFRS tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.
Rohaeni & Aryati (2012)	Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap <i>Income Smoothing</i> dengan Kualitas Audit Sebagai Var. Moderasi	H1: Var. Dependen = <i>Income Smoothing</i> konvergensi IFRS, Var. Independen = konvergensi IFRS H2: Var. Dependen = <i>Income Smoothing</i> , Var. Independen = konvergensi IFRS dan kualitas audit	Hasil penunjukkan bahwa konvergensi IFRS terbukti berpengaruh negatif terhadap <i>income smoothing</i> . Sedangkan hipotesis kedua tidak mendapatkan dukungan data dalam penelitian ini. Interaksi antara variabel IFRS dengan kualitas audit berpengaruh positif terhadap <i>income smoothing</i> .
Santy; Tawakkal; & Pontoh (2013)	Pengaruh Adopsi IFRS terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia	Var. Dependen = Manajemen Laba, Var. Independen = IFRS, Var. kontrol = ukuran ( <i>size</i> ) perusahaan, <i>financial leverage (D/E)</i> , <i>market to book ratio (M/B)</i> , dan <i>institutional investors (II)</i> .	Hasil menunjukkan bahwa adopsi IFRS tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Dengan adanya pemberlakuan IFRS tidak menunjukkan terdapat penurunan manajemen laba. Hasil analisis uji beda yang dilakukan juga menunjukkan bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan tingkat manajemen laba yang signifikan antara sebelum dan sesudah adopsi IFRS.

Tabel 2.3. (Lanjutan)

## Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Darmawan (2012)	Pengaruh Adopsi IFRS terhadap Earnings Response Coefficient pada Perusahaan di Inggris dan Jerman	Var. Dependen = <i>Earnings Response Coefficient (ERC)</i> , Var. Independen = adopsi IFRS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi IFRS dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi dan direspon secara positif oleh para investor. Selain itu terbukti pula bahwa informasi laba dinilai lebih tinggi setelah adopsi IFRS dibandingkan sebelum adopsi IFRS.

Tabel di atas menunjukkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian mengenai konvergensi IFRS dan manajemen laba sudah pernah dilakukan sebelumnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas mengenai manajemen laba yang dilakukan perusahaan multi segmen sebelum dan sesudah penerapan adopsi IFRS 8 menjadi PSAK 5 (2009). Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan adopsi IFRS 8 menjadi PSAK 5 (2009) terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan multi segmen.

## 2.6. Pengembangan Hipotesis

Penerapan IFRS 8 menjadi PSAK 5 (2009) menjadikan perusahaan harus lebih transparan dalam mengungkapkan informasi segmen perusahaan. Semakin transparan informasi segmen yang ada dalam laporan keuangan, maka semakin *valid* informasi keuangan yang akan diperoleh para pengguna laporan keuangan, sehingga

diharapkan mampu meminimalisir keinginan manajer untuk melakukan manipulasi laba pada tingkat segmen. Dugaan penelitian ini adalah perusahaan yang mengadopsi IFRS cenderung memiliki tingkat manajemen laba segmen yang lebih kecil sehingga akan terdapat penurunan manajemen laba di tingkat segmen sesudah adopsi IFRS.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adopsi IFRS memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Qomariah (2013) membuktikan adanya pengaruh negatif dari konvergensi IFRS terhadap tindakan manajemen laba. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu juga membuktikan adanya pengaruh dari konvergensi IFRS terhadap *income smoothing*. Rohaeni & Aryati (2012) dalam penelitiannya membuktikan adanya pengaruh negatif dari konvergensi IFRS terhadap *income smoothing*. Penelitian Darmawan (2012) membuktikan bahwa informasi laba dinilai lebih tinggi setelah adopsi IFRS dibandingkan sebelum adopsi IFRS. Beberapa penelitian terdahulu yang dilaksanakan di Indonesia belum ditemukan penelitian mengenai manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan IFRS 8 menjadi PSAK 5 (2009) khususnya pada perusahaan multi segmen. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui adanya penurunan manajemen laba sesudah penerapan IFRS 8 menjadi PSAK 5 (2009) pada perusahaan multi segmen. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut.

Ha: Terdapat penurunan yang signifikan pada manajemen laba di tingkat segmen sesudah adopsi IFRS 8 menjadi PSAK Nomor 5 (Revisi 2009) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2013.